



RENJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KECAMATAN BEKASI SELATAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Pemerintah Kota Bekasi telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja ini secara umum memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan pada tahun 2026. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025–2026, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Kami berharap dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh aparatur Kecamatan Bekasi Selatan, para pemangku kepentingan, serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan proses pembangunan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Camat Bekasi Selatan

Karya Sukmajaya, S.AP., M.Si.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19720402 199901 1 001

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur, mengamanatkan secara lugas bahwa setiap daerah harus Menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di Era Otonomi Daerah ini terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas) artinya Kepentingan Masyarakat menjadi prioritas utama, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Governance) yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien, Partipatif, Transparan dan Akuntabel.

Kecamatan Bekasi Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Bekasi yang memiliki fungsi dominan sebagai kawasan permukiman perkotaan, perdagangan, jasa, dan pusat pelayanan publik. Secara administratif, Kecamatan Bekasi Selatan terdiri dari lima kelurahan, yaitu Pekayon Jaya, Kayuringin Jaya, Jakasetia, Jakamulya, dan Margajaya. Letak geografisnya berada di koridor strategis kota, dengan aksesibilitas tinggi menuju pusat Kota Bekasi maupun wilayah sekitar Jabodetabek melalui jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan kedekatan terhadap simpul transportasi regional.

Secara umum, tipologi wilayah Kecamatan Bekasi Selatan ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, dinamika pertumbuhan kawasan, dan pergeseran fungsi lahan dari permukiman murni menjadi campuran antara hunian, niaga, dan jasa. Pola tata guna lahan di kelima kelurahan memperlihatkan karakter perkotaan padat dengan sebaran ruang publik yang masih terbatas, khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan.

Kelurahan Pekayon Jaya berkembang sebagai kawasan permukiman menengah dengan koridor perdagangan dan kuliner yang aktif. Permasalahan utama di wilayah ini adalah titik genangan pada musim hujan dan keterbatasan manajemen parkir pada area komersial. Kelurahan Kayuringin Jaya berperan sebagai pusat kegiatan kota, dengan konsentrasi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas rekreasi. Tantangan utamanya meliputi kemacetan lalu lintas pada akhir pekan atau saat kegiatan besar, serta keterbatasan RTH kantong di tengah intensitas kegiatan ekonomi. Kelurahan Jakasetia memiliki karakter sebagai permukiman mapan dengan kantong-kantong UMKM dan potensi pengembangan kampung tematik. Permasalahan yang dihadapi adalah drainase lingkungan yang memerlukan peremajaan serta keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sementara itu, Jakamulya merupakan permukiman padat dengan sebagian kantong hunian menengah. Isu utama di kelurahan ini adalah rawan banjir lokal, keterbatasan RTH, dan minimnya sarana olahraga skala RW. Kelurahan Margajaya memadukan fungsi permukiman, layanan publik, dan perkantoran, namun menghadapi tantangan kemacetan di akses layanan serta kurangnya konektivitas ramah pejalan dan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

penyandang disabilitas. Dari sisi sosial-ekonomi, penduduk Kecamatan Bekasi Selatan didominasi oleh pekerja sektor perdagangan, jasa, dan pegawai kantoran, termasuk komuter ke wilayah Jabodetabek. UMKM, terutama di sektor kuliner, ritel, dan ekonomi kreatif, menjadi penopang perekonomian lokal. Namun, daya saing UMKM masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, dan akses permodalan. Secara sosial, masih terdapat kelompok rentan seperti rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan lansia yang memerlukan intervensi pelayanan sosial dan kesehatan yang terjangkau.

Dari aspek infrastruktur, tantangan utama meliputi kemacetan di koridor utama, keterbatasan trotoar yang layak, serta titik genangan akibat kapasitas drainase yang belum optimal. Isu lingkungan mencakup rendahnya proporsi RTH, tingginya beban sampah domestik, dan paparan panas perkotaan. Upaya pengendalian bencana, terutama banjir lokal, memerlukan strategi terpadu berbasis kelurahan, termasuk pemanfaatan sumur resapan, biopori, dan pengelolaan drainase mikro. Berdasarkan karakteristik tersebut, isu strategis Kecamatan Bekasi Selatan antara lain: (1) peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan konektivitas; (2) pengendalian banjir lokal; (3) penguatan daya saing ekonomi lokal dan UMKM; (4) peningkatan kualitas lingkungan permukiman; serta (5) pemerataan akses dan mutu pelayanan publik di seluruh kelurahan. Strategi pengembangan diarahkan pada integrasi pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan kemitraan dengan sektor swasta untuk mewujudkan wilayah yang produktif, layak huni, dan berkelanjutan.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tahun 2023 dan masa berlaku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga akan berakhir pada Tahun 2029 serta RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.

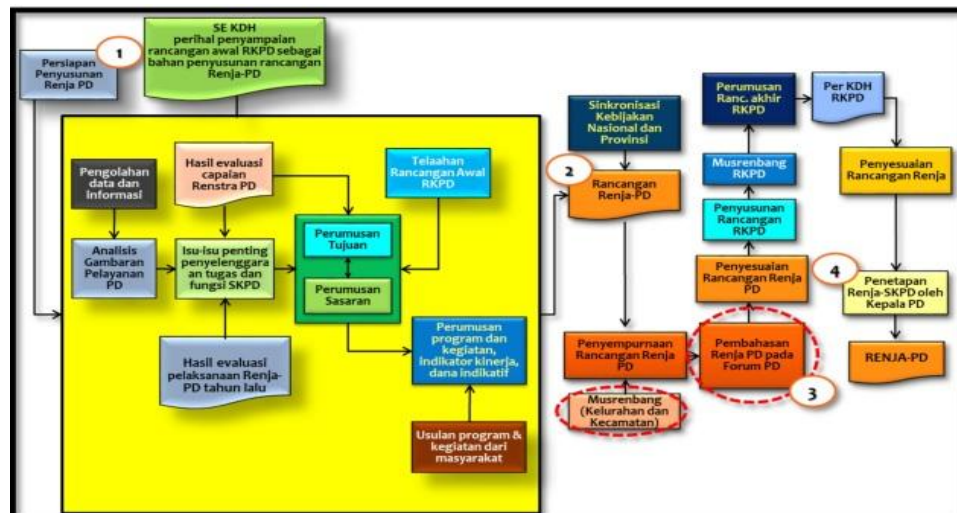
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kecamatan Bekasi Selatan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut.

Dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan rancangan Renja Kecamatan Bekasi Selatan.

Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui Musrenbang. Dari hasil Musrenbang maka Menteri

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan Renstra K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan Renja K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.



Gambar 1 keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKP

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu misi utama Provinsi Jawa Barat adalah meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang secara langsung mendorong penguatan kinerja perangkat daerah, termasuk Kecamatan Bekasi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kecamatan sangat relevan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang harus diatasi, antara lain:

- Perlunya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- Peningkatan peluang kerja dan kesempatan berusaha;
- Penguatan koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional;
- Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM;
- Pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin;
- Perlindungan terhadap hak-hak anak serta pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek pembangunan.

Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang bertujuan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran melalui integrasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan sistematika nomenklatur yang terstandarisasi, diharapkan penyesuaian program dan kegiatan daerah dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, terdapat keterkaitan antara Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan dengan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024, terutama dalam hal sinkronisasi arah kebijakan pembangunan nasional dengan rencana operasional pemerintah daerah. Dokumen Renja Kecamatan ini juga menjadi bagian dari upaya implementasi kebijakan tersebut di tingkat wilayah.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam proses penyusunannya, Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- Capaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- Analisis kondisi internal dan eksternal, termasuk potensi wilayah, tantangan, serta isu strategis pembangunan jangka pendek;
- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Seluruh proses penyusunan Renja ini mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yang menetapkan misi pembangunan daerah sebagai pedoman utama. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD, Kecamatan Bekasi Selatan turut melaksanakan misi pembangunan daerah secara terpadu melalui program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi tersebut diatas, dilaksanakan visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

- Misi :
1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan
 3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
 4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Kecamatan Bekasi Selatan mendukung misi RPJMD Kota Bekasi ke-1 dan 5 yaitu Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Program prioritas yang diampu oleh Kecamatan Bekasi Selatan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan melakukan proses diatas maka Program dan Kegiatan Prioritas di Kecamatan Bekasi Selatan akan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan serta akan mencapai hasil yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk itu diperlukan adanya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

koordinasi antar instansi di Kecamatan Bekasi Selatan agar memastikan adanya sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dan referensi dalam penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perencanaan kinerja Kecamatan Bekasi Selatan dimaksudkan sebagai pedoman utama dalam menetapkan sasaran dan target kinerja guna mewujudkan capaian yang telah dirancang sebelumnya. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pengukur (check and balances) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, sehingga setiap aktivitas pembangunan dapat diarahkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kinerja ini juga berperan penting dalam meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, serta mencegah penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya perencanaan yang sistematis dan terukur, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bekasi Selatan akan senantiasa mengacu pada misi dan tujuan pembangunan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

yang telah ditetapkan, baik di tingkat kecamatan maupun secara keseluruhan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi dasar operasional dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026.
2. Sebagai peran pendukung (supporting OPD) dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, sehingga sinergi antara kebijakan kota dan pelaksanaan di wilayah dapat terjaga.
3. Menyusun strategi pencapaian indikator kinerja Kecamatan Bekasi Selatan, khususnya dalam periode tiga tahunan sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PD. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Bekasi Selatan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bekasi Selatan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Bekasi Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Selatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bekasi Selatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Selatan

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Selatan menunjukkan bahwa tidak seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum meratanya kualitas sumber daya aparatur, yang berdampak pada capaian kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah strategis, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu terus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparatur sangat penting agar mampu menjalankan peran secara profesional dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. SDM yang kompeten merupakan aset utama yang berkontribusi dalam menggerakkan seluruh potensi daerah guna mencapai tujuan kelembagaan.

Dampak dari kendala tersebut menuntut Kecamatan Bekasi Selatan untuk mengintensifkan sosialisasi berbagai kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, khususnya program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan warga. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami, mendukung, dan merasakan manfaat nyata dari setiap program yang dijalankan di wilayah Kecamatan.

Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:

- Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap akhir semester sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik, dengan target capaian yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Merenovasi pendopo untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, ramah, dan mudah diakses masyarakat;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang pelayanan publik.

Dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan, Kecamatan Bekasi Selatan juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

rutin terhadap titik-titik K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilannya akan diukur berdasarkan indikator capaian kinerja yang telah disusun.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program yang telah dirancang, dapat dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas ini mencerminkan tanggung jawab perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program melalui media pelaporan yang bersifat periodik. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 ini juga memuat hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, sekaligus mencantumkan perkiraan capaian tahun 2024 berdasarkan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan. Secara umum, program yang telah dijalankan menunjukkan capaian yang signifikan dan sesuai dengan target. Keterkaitan antara capaian tersebut dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bekasi Selatan menggambarkan bahwa arah kebijakan dan implementasi kegiatan telah berjalan pada jalur yang tepat.

Untuk menjamin akurasi dan objektivitas pencapaian kinerja, dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap kegiatan dan sasaran, melalui tahapan evaluasi yang terukur, transparan, dan berbasis indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja program. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dan Laporan Capaian Kinerja.

Indikator-indikator tersebut adalah Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bekasi Selatan dan Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Bekasi Selatan. Indikator yang sesuai target dikarenakan adanya monitoring secara berkala (tiap triwulan) yang dilakukan oleh internal Kecamatan Bekasi Selatan dalam bentuk evaluasi internal. Selain itu, adanya peran serta masyarakat maupun stakeholder terkait mampu mendorong nilai capaian sesuai target. Kebijakan perencanaan dan penganggaran kedepan perlu terus dievaluasi sehingga diharapkan di tahun-tahun kedepan seluruh Program, Kegiatan dan sub Kegiatan tetap mencapai target bahkan melebihi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 dan capaian Renstra Tahun 2024 Capaian Indikator Kinerja sasaran dalam Renja Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2024 ditargetkan pada Renstra Perubahan 2024-2026 yaitu sebesar 75,5%;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bekasi Selatan memperoleh hasil IKM ditargetkan sebesar 85% pada Renstra Perubahan 2024-2026;
3. Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan pada Renstra Perubahan Kecamatan Bekasi Selatan ditargetkan sebesar 31% pada Renstra Perubahan 2024-2026.

Dalam mencapai sasaran tersebut, Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2024 melaksanakan 5 Program yang terdiri dari 1 Program BLPU dan 4 Program BLU, 13 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan dan 5 Kelurahan. Program-program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana sebesar Rp 27.609.237.600,- yang di dukung dengan 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan
2. Program BLU yang dilaksanakan di Kecamatan dan 5 Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 12.408.000.000,-
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, alokasi dana sebesar Rp. 570.000.000,- didukung dengan 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, alokasi dana sebesar Rp. 11.658.000.000,- didukung dengan 2 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan;
 - c. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000,- didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- didukung dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan.

Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel 1

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bekasi Selatan
Dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bekasi Selatan Sampai Dengan Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		100%	100%	100	100	
7.1	KECAMATAN		100%	100%	100	100	
7.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100	100	
1.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	100%	100	100	
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1,00 Laporan	1	100	
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100,00%			
1.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	100%	100%	100	100	
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58,00 Orang/Bulan	58,00 Orang/Bulan	58	100	
1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,00 Laporan	15,00 Laporan	15	100	
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	100,00%	100,00%			

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100	100	
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32,00 Orang	32,00 Orang	32	100	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%			
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100	
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1,00 Paket	1	100	
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3,00 Paket	3	100	
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	2,00 Paket	2	100	
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	12	100	
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12	100	
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,00 Dokumen	50,00 Dokumen	50	100	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%			
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100	
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46,00 Unit	46,00 Unit	46	100	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%			
1.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	100%	100	100	
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12	100	
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12	100	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%			
1.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100%	100%	100	100	
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	2,00 Unit	2	100	
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33,00 Unit	33	100	
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 Unit	50,00 Unit	50	100	
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00 Unit	3,00 Unit	3	100	
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	100,00%	100	100	
2.2.03	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Capaian Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat</i>	100%	100%	100	100	
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	12	100	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
		dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	12	100	
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2	100	
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2	100	
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2	100	
2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	2	100	
2.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Capaian Kepuasan terhadap Pelayanan Masyarakat</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12	100	
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	100,00%	100	100	
3.2.02	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	100	100	
3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,00 Lembaga Kemasyarakatan	6,00 Lembaga Kemasyarakatan	6	100	
3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4,00 Unit	4,00 Unit	4	100	
3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	1,00 Unit	1	100	
3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4,00 Unit	4,00 Unit	4	100	
3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4,00 Unit	4,00 Unit	4	100	
3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4,00 Unit	4,00 Unit	4	100	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas/Ormas	7,00 Pokmas/Ormas	7	100	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259,00 Pokmas/Ormas	259,00 Pokmas/Ormas	259	100	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127,00 Pokmas/Ormas	127,00 Pokmas/Ormas	127	100	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279,00 Pokmas/Ormas	279,00 Pokmas/Ormas	279	100	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269,00 Pokmas/Ormas	269,00 Pokmas/Ormas	269	100	
3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51,00 Pokmas/Ormas	51,00 Pokmas/Ormas	51	100	
3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12	100	
3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100	100	
3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	100	
3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	100	
3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	100	
3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	100	
3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2,00 Lembaga Kemasyarakatan	2	100	
3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,00 Laporan	1,00 Laporan	1	100	
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100,00%	100,00%	100	100	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024-2026	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			KET
				TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	
4.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Bekasi Selatan</i>	100%	100%	100	100	
4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan H	12,00 Laporan	12,00 Laporan	12	100	
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	100,00%	100	100	
5.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Telaksannya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	100	
5.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	12	100	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD di atas, tidak semua program yang telah direncanakan terealisasi 100%. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur mengakibatkan Kecamatan Bekasi Selatan belum semuanya dapat terealisasi sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas aparatur dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan maka dari itu setiap tahunnya kami terus mengusulkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal yang tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan

- 1.** Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan yang tidak tercapai dan tidak terpenuhinya dapat dilihat dari pencapaian indikator Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sebagaimana berikut ini:
 - a.** Kurangnya Koordinasi dan Pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak tercapai;
 - b.** Keterlambatan dalam melakukan pembuatan dokumen yang sudah di tentukan melalui alokasi anggaran;
 - c.** Adanya regulasi baru dan perubahan kebijakan yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- d. Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian;
 - e. Belum Optimlanya sosialisasi terkait perubahan kebijakan sehingga terjadi keterlambatan informasi.
2. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/kegiatan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggarannya. Adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan.
 3. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja program/ kegiatan yang melebihi target adalah karena tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi di wilayah serta adanya peran aktif dan feedback yang baik dari masrakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan

2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra pada Kecamatan Bekasi Selatan

Adanya perubahan nomenklatur pada program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada pertengahan Renstra yang menyebabkan perubahan indikator kinerja dan target capaian program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Bekasi Selatan

2.1.3 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi untuk faktor- faktor penyebab tersebut

Kebijakan atau Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- a. Kegiatan yang belum mencapai target harus dilakukan pencairan agar realisasi fisik dan realisasi anggaran tercapai;
- b. Meningkatkan Kualitas Penataan dan Kompetensi aparatur;
- c. Melakukan Peninjauan Kembali terhadap capaian indikator sasaran, program dan kegiatan;
- d. Meningkatkan Koordinasi berjenjang dan kontinu dengan aparatur, Instansi terkait dan masyarakat;
- e. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian target secara berkala

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Bekasi Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Kinerja pelayanan yang baik dari setiap pegawai pemerintah Kecamatan sangat mempengaruhi hasil pelayanan yang maksimal. Setiap pegawai dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di dalam proses pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat kegiatan pelaksanaan tersebut.

Salah satunya adalah prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan layanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Rumusan masalah ini adalah sejauh mana kinerja pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Bekasi Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan di Kecamatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan fungsinya serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Saranannya adalah perlu meningkatkan disiplin kerja aparatur dan kemampuan masing-masing petugas agar bisa diselesaikan dengan baik serta menambah fasilitas penunjang kegiatan pelayanan.

Aparatur Kecamatan dituntut untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga akan lebih memahami kondisi masyarakat. Untuk itu pendayagunaan kinerja, pegawai harus ditinggalkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam Hal pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan yang disertai pendanaan APBD Kota Bekasi, dapat disimpulkan tingkat kinerja yang cukup baik. Demikian halnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak disertai pendanaan, dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kondusifitas penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik inilah yang harus didukung dengan anggaran yang jelas, efisiensi dan efektif.

Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

INDIKATOR	SATU AN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			REALISASI CAPAIAN				PRO YEKSI
		2023	2024	2025	2024	2024	2025	2025	
Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan	Nilai	75	76	76.5	75.16	98.9%	-	-	75.5
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.5	82	82.5	82.1	100.12%	-	-	83

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI
		2023	2024	2025	2024	2024	2025	2025	2026
Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	%	-	6%	7%	8	160%	-	-	8%

1. Nilai AKIP Kecamatan Bekasi Selatan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana kinerja Kecamatan Bekasi Selatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan data dalam tabel, target kinerja Nilai AKIP sejak tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yaitu dari 75 pada tahun 2023 menjadi 76 di tahun 2024 dan 76.5 pada tahun 2025.

Realisasi capaian pada tahun 2024 tercatat sebesar 75.16, yang berarti realisasi tersebut mencapai 98.9% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Selatan telah hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai angka target secara penuh, pencapaian ini patut diapresiasi mengingat peningkatan nilai AKIP memerlukan perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program yang terukur.

Untuk proyeksi tahun 2026, nilai AKIP ditargetkan meningkat menjadi 75.5. Proyeksi ini tampaknya mempertimbangkan capaian riil tahun sebelumnya serta mempertahankan tren realistis. Target ini juga menjadi sinyal bahwa masih diperlukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelaporan kinerja, efisiensi program, serta peningkatan budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Secara umum, indikator ini menjadi cerminan dari kinerja manajerial dan administratif Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan. Upaya peningkatan nilai AKIP harus terus diperkuat melalui monitoring dan evaluasi program, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem pelaporan kinerja.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik berdasarkan penilaian langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Kecamatan Bekasi Selatan menempatkan indikator ini sebagai salah satu prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan, yang tercermin dari target kinerja yang konsisten selama tiga tahun terakhir, yakni 82.5 pada tahun 2023, 2024, dan 2025.

Pada tahun 2024, realisasi capaian IKM berada di angka 82.1, yang jika dibandingkan dengan target, menunjukkan capaian sebesar 100.12%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan secara angka dari target, namun secara persentase justru mencerminkan keberhasilan yang melebihi target. Ini mungkin disebabkan oleh adanya perbaikan dalam mekanisme survei atau validitas data responden.

Tingginya capaian ini dapat menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh kecamatan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sudah menunjukkan hasil positif. Misalnya, inovasi dalam pelayanan digital, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui forum warga, dan peningkatan kapasitas pelayanan di kelurahan telah berdampak terhadap persepsi positif masyarakat.

Untuk tahun 2026, proyeksi IKM ditingkatkan menjadi 83. Hal ini menunjukkan keinginan kuat dari pihak Kecamatan Bekasi Selatan untuk terus meningkatkan standar layanan publik. Tantangan ke depan adalah menjaga dan bahkan meningkatkan kepuasan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya, beban kerja, serta kompleksitas kebutuhan warga yang semakin meningkat.

Dengan demikian, indikator IKM menjadi bukti nyata dari keberhasilan pemerintah kecamatan dalam menjalin hubungan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam indikator ini juga turut menunjang akuntabilitas dan kredibilitas kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik.

3. Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bekasi Selatan yang menetapkan Persentase Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik merupakan wujud nyata komitmen pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. LKM di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan terdiri dari berbagai unsur masyarakat, antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tokoh agama seperti imam masjid, hingga para marbot sebagai penggerak sosial di lingkungannya. Keberadaan LKM ini berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah kecamatan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 60% LKM aktif dan akan meningkat secara konsisten sebesar 2,5% setiap tahunnya hingga tahun 2029 mencerminkan upaya peningkatan peran serta masyarakat secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Peningkatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan prinsip partisipatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Aktivasi LKM dalam mendukung pelayanan publik mencakup berbagai bentuk kontribusi, mulai dari sosialisasi program pemerintah, pengelolaan Posyandu dan PKK sebagai pusat layanan kesehatan keluarga, fasilitasi musyawarah warga oleh RT dan RW, hingga partisipasi tokoh agama dalam membangun ketertiban sosial. Dengan adanya indikator ini, Kecamatan Bekasi Selatan tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan administratif, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik mendapat dukungan sosial, moral, dan partisipatif dari masyarakat.

Dengan demikian, IKU ini tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bekasi Selatan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerugian besar.

isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Bekasi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat;
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Peningkatan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Pemeliharaan Kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan;
4. Peningkatan Ketenteraman dan Keteriban Umum di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan;
5. Pembangunan Kewilayahan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kelima hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan Bekasi Selatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Bekasi Selatan berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat Bekasi Selatan. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Bekasi Selatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.
2. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.
3. Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi. Secara teknis, pembangunan kewilayahan merupakan sebagian wewenang

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam hal ini Kecamatan Bekasi Selatan memfasilitasi dan meneruskan permasalahan pembangunan serta infrastruktur yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan kepada Dinas terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.

4. Pemeliharaan lingkungan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan yang melibatkan warga Masyarakat harus memperhatikan pelaksanaan dalam melakukan kebersihan lingkungan, dalam hal ini kecamatan Bekasi Selatan memfasilitasi dan meneruskan permasalahan kebersihan lingkungan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan kepada dinas terkait untuk pelaksana teknis dinas yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.
5. Peningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, dapat dilakukan dengan koordinasi antara Kecamatan Bekasi Selatan dengan instansi yang terkait ,sehingga dapat membuat masyarakat menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan yang dilakukan

Hambatan yang ada saat ini lebih terkait ke dalam hal anggaran dan kegiatan yang belum di akomodir maka dari itu setiap tahunnya Kecamatan Bekasi Selatan terus mengusulkan kegiatan yang sama agar dapat di akomodir dan tercapainya SDM Kecamatan Bekasi Selatan yang unggul dalam memberikan Pelayanan Publik.

Beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah ;

1. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku OPD dalam perencanaan dan penganggaran;
2. Masih lemahnya koordinasi antar lintas OPD, Instansi Vertikal dalam perencanaan pembangunan;
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bekasi.

Adapun dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel pada pemerintah kota Bekasi;
2. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi;
3. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Kecamatan Bekasi Selatan :

1. Tantangan :
 - a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
 - b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
 - c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan;
2. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi:
 - a. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
 - b. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Bekasi Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan public;
 - d. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Selatan.

Formulasi Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Bekasi Selatan, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat;
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Peningkatan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Penguatan peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak; dan
4. Pembangunan Kewilayahan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD juga merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi serta memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2025 menjabarkan Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024-2026 Kecamatan Bekasi Selatan dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan berpedoman pada RKPD Kota Bekasi.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bekasi Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, Sub Kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Selatan.

Untuk menjamin kualitas Rencana Kerja yang telah disusun oleh Kecamatan Bekasi Selatan maka perlu dilakukan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Kecamatan Bekasi Selatan.

Penelaahan tersebut dilakukan dengan melakukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan. Review meliputi Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Kecamatan Bekasi Selatan telah sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Adapun hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD berkaitan dengan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan yang telah direncanakan dan diusulkan. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan Kecamatan Bekasi Selatan adalah pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta pendanaannya. Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mendukung program kegiatan Pemerintah Daerah yang tertuang didalam RPD Kota Bekasi.

Berdasarkan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang terdapat di Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 terdapat beberapa perubahan (penambahan) terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya. Perubahan tersebut didasari oleh :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyesuaian terhadap Renstra Kecamatan Bekasi Selatan guna mendukung Program dan Prioritas Pembangunan yang tertuang di dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

1. Penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.30-Tapem/II/2023 terkait Pemberian Bantuan Operasional RW dan RT;
2. Adanya perubahan tentang peyusunan anggaran keuangan daerah yang juga mempengaruhi penambahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya perubahan target indikator sesuai dengan hasil desk Renja Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-900 Tahun 2023.

Adapun perbedaan yang dimaksud pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Bekasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Ket
				TARGET 2026	Rancangan Renja (Rp)	Rancangan Akhir Renja (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
		KECAMATAN BEKASI SELATAN			49.647.931.920,00	48.212.633.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			49.647.931.920,00	48.212.633.000,00			
	7.01	KECAMATAN			27.167.474.920,00	25.722.176.000,00			
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.187.474.920,00	24.707.176.000,00			-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	10.000.000,00	15.000.000,00			-
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	0,00	10.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	21.461.034.920,00	20.603.030.160,00			-
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2590 Orang/bulan	21.451.034.920,00	20.598.030.160,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100 %	170.000.000,00	0,00			-
	7.01.01.2.02.0001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	20.000.000,00	0,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	7.01.01.2.02.0007	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	150.000.000,00	0,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	665.000.000,00	705.000.000,00			-
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	250.000.000,00	200.000.000,00			-
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	250.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.916.440.000,00	2.534.145.840,00			-
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	356.800.000,00	406.800.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.559.640.000,00	2.127.345.840,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang	100 %	715.000.000,00	650.000.000,00			-

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah yang Akuntabel						
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	265.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			115.000.000,00	110.000.000,00			-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	50.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	50.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	65.000.000,00	70.000.000,00			-
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	65.000.000,00	70.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			745.000.000,00	805.000.000,00			-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100 %	670.000.000,00	695.000.000,00			-
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000,00	145.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100 %	75.000.000,00	110.000.000,00			-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	35.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			60.000.000,00	50.000.000,00			-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	100 %	60.000.000,00	50.000.000,00			-
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000,00	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			60.000.000,00	50.000.000,00			-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Wilayah Tertib	100 %	60.000.000,00	50.000.000,00			-
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	60.000.000,00	50.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		KELURAHAN PEKAYONJAYA			5.819.720.600,00	5.819.720.600,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			5.819.720.600,00	5.819.720.600,00			
	7.01	KELURAHAN			5.819.720.600,00	5.819.720.600,00			
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5.779.720.600,00	5.779.720.600,00			-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100 %	5.779.720.600,00	5.779.720.600,00			-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279 Pokmas / Ormas	5.539.720.600,00	5.539.720.600,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga K emasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Pekayonjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		KELURAHAN KAYURINGINJAYA			6.274.382.800,00	6.274.382.800,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			6.274.382.800,00	6.274.382.800,00			
	7.01	KELURAHAN			6.274.382.800,00	6.274.382.800,00			
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	40.000.000,00			-

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kayuringinjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			6.234.382.800,00	6.234.382.800,00			-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100 %	6.234.382.800,00	6.234.382.800,00			-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kayuringinjaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269 Pokmas / Ormas	5.994.382.800,00	5.994.382.800,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kayuringinjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kayuringinjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		KELURAHAN JAKASETIA			4.559.761.600,00	4.559.761.600,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.559.761.600,00	4.559.761.600,00			
	7.01	KELURAHAN			4.559.761.600,00	4.559.761.600,00			
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakasetia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.519.761.600,00	4.519.761.600,00			-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100 %	4.519.761.600,00	4.519.761.600,00			-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakasetia	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259 Pokmas / Ormas	4.279.761.600,00	4.279.761.600,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakasetia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakasetia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		KELURAHAN JAKAMULYA			3.895.000.000,00	3.895.000.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.895.000.000,00	3.895.000.000,00			
	7.01	KELURAHAN			3.895.000.000,00	3.895.000.000,00			
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.855.000.000,00	3.855.000.000,00			-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100 %	3.855.000.000,00	3.855.000.000,00			-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188 Pokmas / Ormas	3.615.000.000,00	3.615.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga K emasyarakat an	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Jakamulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		KELURAHAN MARGAJAYA			1.931.592.000,00	1.941.592.000,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.931.592.000,00	1.941.592.000,00			
	7.01	KELURAHAN			1.931.592.000,00	1.941.592.000,00			
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	40.000.000,00			-

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.891.592.000,00	1.901.592.000,00			-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100 %	1.891.592.000,00	1.901.592.000,00			-
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91 Pokmas / Ormas	1.651.592.000,00	1.661.592.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00			-
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga K emasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
--	--	--	--	------------------------------	---------------	---------------	--	------------------------------------	--

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yaitu melalui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kecamatan merupakan Forum Musyawarah Tahunan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan.

Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

NO	KELURAHAN	USULAN	PAGU USULAN
1	JAKASETIA	124	28.010.500.000
2	MARGAJAYA	16	8.250.000.000
3	PEKAYON JAYA	73	26.659.294.700
4	KAYURINGIN JAYA	79	19.091.670.123
5	JAKAMULYA	181	179.040.195.000
JUMLAH		473	261.051.659.823

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Daftar Lengkap Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi tidak ada yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Tabel 5 Usulan dan Telaahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Bekasi Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

No	Program	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L			

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BEKASI SELATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan yaitu merupakan keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :

1. Pembangunan SDM

- Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global..

2. Pembangunan Infrastruktur

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

- Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

- Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

- Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Renja Kemendagri memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bekasi Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renja kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bekasi Selatan dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bekasi Selatan disediakan ruang bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bekasi Selatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Kerja Tahun 2026. Penetapan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi dalam

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelayanan langsung kepada masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik secara berkesinambungan.

Tabel 3.1
Relevansi Tujuan, Sasaran dengan RPJMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
- Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Nilai)	82,98	83,83	84,7	85,6	86,52
		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik (%)	70%	72,5%	75%	77,5%	80%
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (%)	1	1,02	1,04	1,06	1,08

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2.1 Tujuan

Tujuan “Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bekasi Selatan” mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertata rapi, nyaman, dan berdaya saing. Estetika kota yang baik bukan hanya memperindah wilayah, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kebanggaan masyarakat. Infrastruktur modern mendukung mobilitas, kegiatan ekonomi, dan pelayanan yang efisien. Sementara itu, kualitas pelayanan publik yang prima menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan sinergi ketiganya, Bekasi Selatan diharapkan mampu menjadi kawasan perkotaan yang maju, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

3.2.2 Sasaran

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, Kecamatan Bekasi Selatan menetapkan sasaran strategis untuk meningkatkan peran serta masyarakat serta memperkuat efektivitas layanan. Sasaran pertama, yaitu meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat (LKM) yang mendukung pelayanan publik, mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. LKM berperan sebagai wadah partisipasi warga dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan indikator presentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik, pemerintah kecamatan dapat memantau sejauh mana lembaga-lembaga ini terlibat secara nyata. Aktivitas LKM yang optimal akan memperkuat komunikasi antara warga dan pemerintah, mempercepat identifikasi permasalahan lokal, serta membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan partisipasi LKM juga memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar relevan dan berdampak positif bagi warga.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sasaran kedua, yaitu meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, berfokus pada kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Indikator yang digunakan adalah persentase peningkatan kepuasan masyarakat di kecamatan. Hal ini penting karena kepuasan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan nyata dalam pelayanan publik. Peningkatan efektivitas layanan mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan, dan peningkatan kompetensi aparatur. Dengan mengukur kepuasan masyarakat secara berkala, pemerintah kecamatan dapat mengevaluasi kelemahan layanan dan segera melakukan perbaikan yang diperlukan.

Kedua sasaran ini saling melengkapi. LKM yang aktif akan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik, sementara efektivitas pelayanan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kombinasi keduanya diharapkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan partisipatif.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Kecamatan Bekasi Selatan berkomitmen untuk membangun ekosistem pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan kekuatan partisipasi LKM dan fokus pada peningkatan kualitas layanan, diharapkan Bekasi Selatan dapat terus meningkatkan kesejahteraan warganya serta mendukung visi Kota Bekasi sebagai kota modern dengan pelayanan publik yang unggul..

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal di Kecamatan Bekasi Selatan, telah disusun berbagai program dan kegiatan strategis untuk Tahun 2026 yang mengacu pada target indikator kinerja yang terukur. Program-program ini terbagi dalam beberapa kategori besar, yakni program penunjang urusan pemerintahan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah difokuskan pada peningkatan kinerja perangkat daerah melalui kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Kegiatan ini diukur melalui indikator keselarasan perencanaan dengan penganggaran serta persentase keberhasilan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target capaian sebesar 100%. Selain itu, capaian kinerja kegiatan penunjang urusan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian juga ditargetkan sebesar 100%, dengan tambahan indikator Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan mencapai 84,40%. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung tata kelola yang akuntabel.

Dalam aspek pengelolaan administrasi umum, termasuk pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, Kecamatan Bekasi Selatan juga menargetkan capaian 100% pada seluruh indikator. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengelolaan barang daerah berjalan transparan, tertib, dan sesuai regulasi. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan dan penyediaan jasa, pemeliharaan aset, serta penyusunan laporan yang akuntabel.

Sementara itu, pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, fokus utama diarahkan pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Indikator yang digunakan berupa capaian kepuasan pelayanan publik dengan target 100%. Kegiatan pendukungnya antara lain koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Selanjutnya, dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kecamatan Bekasi Selatan menargetkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Target indikator seperti jumlah lembaga aktif dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di tingkat kelurahan serta kecamatan semuanya dipatok sebesar 100%. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan berbasis pemberdayaan.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum difokuskan pada pengelolaan konflik dan pelaporan kegiatan pemerintah yang menjadi kewenangan camat. Indikator keberhasilannya juga ditargetkan sebesar 100%, sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis kewenangan.

Terakhir, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum difokuskan pada penciptaan kondisi wilayah yang tertib, aman, dan nyaman. Target yang ditetapkan adalah 100% koordinasi dan realisasi kegiatan dalam menjaga ketertiban, termasuk pencapaian wilayah tertib K3 (Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan).

Dengan capaian indikator yang ditargetkan hampir seluruhnya sebesar 100%, maka Kecamatan Bekasi Selatan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program secara optimal dan menyeluruh. Ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berpihak pada peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan tahun 2026

Program/Kegiatan	Indikator	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah tertib K3	100,00%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bekasi Selatan

Terdapat 5 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Selatan terdiri dari 13 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 48.202.633.000,00. Program yang dilakukan oleh Kecamatan Bekasi Selatan mendukung Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2024-2026. Adapun Rencana Program dan Pendanaannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota: Rp. 24.637.176.000,00
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan: Rp. 23.165.457.000,00
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik: Rp. 300.000.000,00
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Rp. 50.000.000,-
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sarana Pelayanan Umum: Rp. 50.000.000,-

Tabel 4.1
Rekapitulasi Program Dan Kegiatan Tahun 2026

NO	BLPU/BLU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU 2025	KET
1	BLU	4	6	28	23.565.457.000	
2	BLPU	1	7	18	24.637.176.000	
	TOTAL	5	13	46	48.202.633.000	

Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.2
Program dan Pagu Indikatif Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
	KECAMATAN BEKASI SELATAN		100%	48.202.633.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		100%	48.202.633.000,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	48.202.633.000,00	
		Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100,00%	23.165.457.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	22.855.457.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6,00 Lembaga	145.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Jakasetia
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Jakamulya
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Pekayonjaya
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Kayuringinjaya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3,00 Unit	200.000.000,00	Kelurahan Margajaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,00 Pokmas	570.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259,00 Pokmas	4.279.761.600,00	Kelurahan Jakasetia
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188,00 Pokmas	3.615.000.000,00	Kelurahan Jakamulya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279,00 Pokmas	5.539.720.600,00	Kelurahan Pekayonjaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	269,00 Pokmas	5.994.382.800,00	Kelurahan Kayuringinjaya
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51,00 Pokmas	1.661.592.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6,00 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	310.000.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	35.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Jakasetia
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Jakamulya
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Pekayonjaya
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Kayuringinjaya
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00 Lembaga	40.000.000,00	Kelurahan Margajaya
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12,00 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.637.176.000,00	
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,00%	15.000.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	14,00 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.01.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,00 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100,00%	20.533.030.200,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.533.030.200,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.988,00 Orang/bulan	20.528.030.200,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,00 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	8420,00%	0	
7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	
7.01.01.2.02.0001	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3,00 Orang	0	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
7.01.01.2.02.0007	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61,00 Orang	0	Kecamatan Bekasi Selatan
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%	3.439.145.800,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	705.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	350.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	125.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12,00 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.06.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,00 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24,00 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.534.145.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	406.800.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	2.127.345.800,00	Kecamatan Bekasi Selatan
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	650.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	650.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	250.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50,00 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100,00%	300.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	230.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	40.000.000,00	Kelurahan Jakasetia
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	40.000.000,00	Kelurahan Jakamulya
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait	12,00 Dokumen	40.000.000,00	Kelurahan Pekayonjaya

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
		dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00 Dokumen	40.000.000,00	Kelurahan Kayuringinjaya
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	120,00 0	30.000.000,00	Kelurahan Margajaya
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	70.000.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12,00 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100,00%	50.000.000,00	
7.01.04.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000,00	

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

KODE	Urusan/PD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target 2026		Lokasi
			Fisik	Keuangan	
7.01.04.2.01.0001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah tertib K3	100,00%	50.000.000,00	
7.01.05.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	50.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,00 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Bekasi Selatan

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bekasi Selatan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, guna menjamin terwujudnya visi Kota Bekasi. Perencanaan ini disusun secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi segenap aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kecamatan Bekasi Selatan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Penetapan status hukum terhadap dokumen perencanaan ini sehingga implementasinya bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif;
2. Sosialisasi rencana strategis kepada seluruh pihak terkait secara intensif dan berkelanjutan guna meningkatkan komitmen serta motivasi bersama dalam melaksanakan rencana strategis tersebut. Komunikasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan indikatif oleh seluruh aparat dan pemangku kepentingan secara disiplin dan konsisten sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, guna menjamin pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat agar seluruh pihak berjalan searah dengan rencana strategis yang ditetapkan;
4. Pengukuran capaian terhadap sasaran dan target secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja;
5. Evaluasi dan kajian atas hasil capaian yang telah diukur untuk menilai kinerja aparat, serta jika diperlukan, dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja guna memastikan tercapainya visi dan misi organisasi.

Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia dalam menghadapi

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

isu-isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi. Diharapkan, rencana ini mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan tolok ukur RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

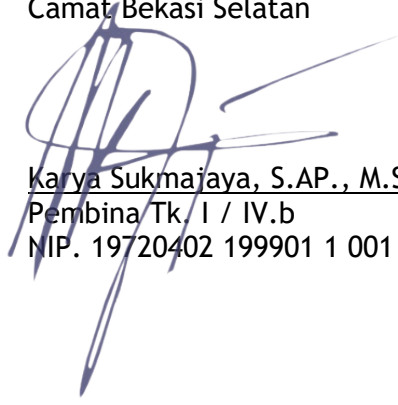
Perencanaan ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Bekasi Selatan. Agar pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 berjalan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat bersama Sekretaris Kecamatan;
2. Seluruh komponen seksi dan sub bagian agar melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Renja Tahun 2026 secara optimal;
3. Program-program dalam Renja 2026 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran;
4. Renja Kecamatan Bekasi Selatan Tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan kinerja, dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD;
5. Setiap komponen diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pencapaian target Renja Tahun 2026, baik dari internal pemerintah maupun masyarakat;
6. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2026, pengendalian dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing seksi/bagian;
 - b. Camat menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan dari setiap bidang;
 - c. Kepala seksi mengevaluasi kinerja berdasarkan periode sebelumnya;
 - d. Camat menyusun evaluasi menyeluruh berdasarkan masukan dari bidang-bidang;
 - e. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Paraf Koordinasi	
Camat Bekasi Selatan	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sebagai penutup, kami bersama seluruh aparat di Kecamatan Bekasi Selatan berharap agar Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat memenuhi aspek akuntabilitas kepada Pemerintah Kota Bekasi serta menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan demi peningkatan kinerja di masa mendatang. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, oleh karenanya kami terbuka terhadap bimbingan, arahan, serta saran perbaikan demi penyempurnaan rencana ini di waktu yang akan datang.

Bekasi,
Camat Bekasi Selatan



Karya Sukmajaya, S.AP., M.Si.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19720402 199901 1 001